

PENGEMBANGAN USAHA KECIL dan MENENGAH (UKM) UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU

Almasdi Syahza

**Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Universitas Riau Pekanbaru**

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

Abstrak

Program ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan sedang gencar dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hulu. Karena program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam pengembangan UKM ini masih ditemukan permasalahannya, antara lain: Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; Ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya; Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi; Lemahnya organisasi dan manajemen usaha; dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM.

Kata kunci: Usaha kecil dan menengah, percepatan ekonomi daerah

Pendahuluan

Sasaran pembangunan Daerah Riau mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil. Untuk menunjang kelima pilar pembangunan tersebut pemerintah daerah Riau juga melaksanakan pembangunan dibidang lain yaitu: transportasi, irigasi, dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman. Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau.

Dari sisi lain perkembangan perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat dilepaskan dari peranan dunia usaha yang ada, baik skala kecil maupun skala besar. Jumlah dunia usaha relatif lebih banyak yang keberadaannya tersebar ke seluruh wilayah, sekalipun dalam distribusinya kurang menyebar di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengembangan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan, baik secara kelembagaan maupun dalam operasionalisasinya serta pengembangan investasi yang mengarah kepada sektor-sektor riil dan menyangkut hayat hidup orang banyak.

Program ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hulu harus terus didukung. Karena program ini sudah menjadi program pemerintah mulai dari pusat, propinsi sampai kepada kabupaten/kota. Program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha.

Krisis ekonomi yang melanda negara kita telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003c).

Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Selain itu pengembangan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya dengan pengembangan dunia usaha ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

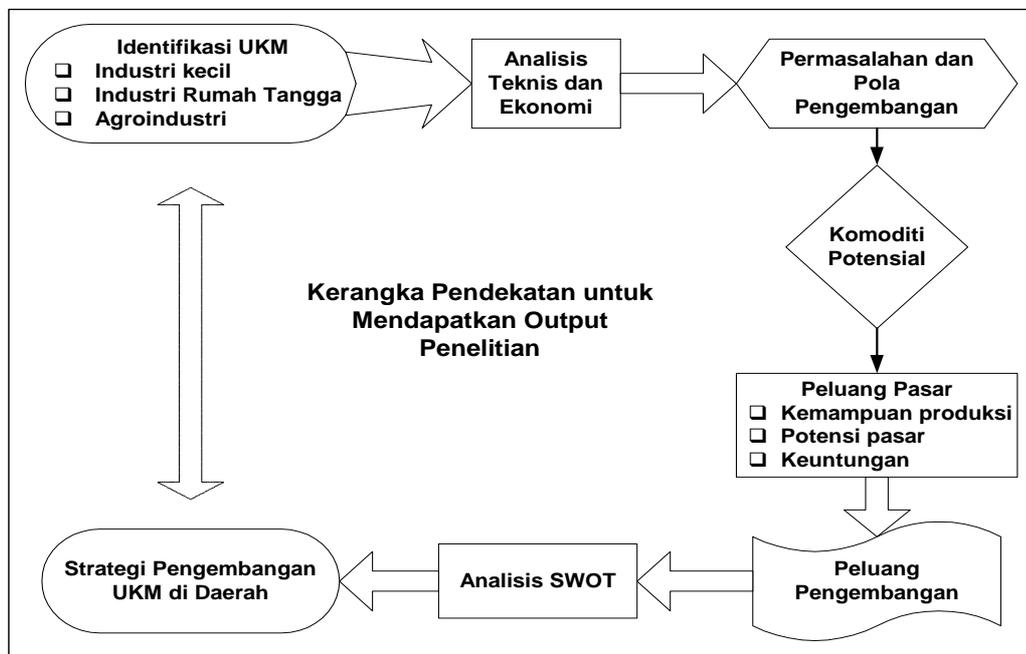
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rencana strategis pengembangan dunia usaha untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten.

Metode Penelitian

Penelitian pengembangan dunia usaha ini terfokus kepada studi pengembangan usaha skala kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini mempergunakan metode survei dengan penentuan lokasi secara bertahap dan sepenuhnya dilakukan di daerah/kecamatan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah daerah potensial untuk pengembangan UKM dari segi; keragaman jenis, produksi, ketersediaan bahan baku, peluang pasar, dan sumberdaya manusianya. Kriteria pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang potensial menghasilkan produk unggulan daerah untuk pengembangan UKM; 2) sampel yang dipilih adalah pengusaha UKM di daerah terpilih.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pelaku bisnis di daerah terutama dalam kegiatan UKM, pemuka masyarakat, birokrasi di pedesaan. Data primer juga dilengkapi dari lembaga tataniaga yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, dan instansi yang terkait yang dapat mendukung penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian ini mengacu kepada informasi data statistik perindustrian, hasil penelitian sebelumnya, dan data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan ditemukan strategi pengembangan dunia usaha untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Langkah-langkah untuk pemecahan masalah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran dan Pemecahan Masalah

Hasil dan Pembahasan

1. Keuntungan Otonomi Daerah Bagi UKM

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan

pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah (Bambang Yudoyono, 2001), antara lain: *Pertama*, bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat, paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktor; dan *kelima*, kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik.

Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha.

2. Perkembangan dan Penyebaran UKM

Usaha skala kecil dan menengah (UKM) di daerah selama ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di daerah itu sendiri, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi; jumlah pengangguran yang besar, terutama bagi golongan masyarakat yang berpendidikan rendah; ketimpangan distribusi pendapatan; proses pembangunan yang tidak merata antara kota dengan desa serta masalah urbanisasi dengan segala aspek negatifnya. Artinya keberadaan usaha kecil dan menengah di daerah diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Untuk sektor industri UKM, membuat berbagai macam produk yang menghasilkan barang-barang kebutuhan konsumsi dan barang setengah jadi yang akan dipakai sebagai bahan baku industri hilirnya. Untuk jenis-jenis barang konsumsi tertentu, seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki, dan alat-lat rumah tangga, UKM tetap dapat bertahan di pasar dan bahkan menikmati pertumbuhan volume produksi yang lumayan setiap tahunnya, walaupun UKM menghadapi persaingan yang ketat dengan industri skala besar

yang juga membuat jenis-jenis barang yang sama. Dari kedua skala usaha yang menghasilkan produk sama namun dari sisi lain menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut bisa saja dalam hal warna, bentuk, rasa, kemasan, harga, atau pelayanan. Dengan perkataan lain, walaupun jenis barangnya sama UKM memiliki pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli tertentu.

Untuk jenis-jenis produk tertentu pada umumnya barang-barang konsumsi sederhana hasil dari UKM memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Pada umumnya dari kalangan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Sampai pada tahun 2002 perkembangan UKM di Kabupaten Indragiri Hulu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Sebanyak 205 industri rumah tangga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 563 orang. Apabila ini dibina dalam bentuk koperasi industri rumah tangga, maka ini merupakan potensi pengembangan ekonomi daerah. Selama ini sudah terbukti bahwa industri kecil dapat bertahan terhadap krisis ekonomi. Sayangnya industri rumah tangga ini selalu merasa tersisihkan, terutama dalam penyediaan modal kerja. Akibat diskriminasi ini menyebabkan mereka sulit untuk berkembang.

Industri lain yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu adalah industri kimia dan bangunan. Industri ini sebanyak 614 unit yang memakai tenaga kerja sebanyak 2.096 orang dan tersebar di beberapa daerah. Pada industri ini lebih didominasi oleh industri pembuat batu bata, industri perabot rumah tangga, dan kegiatan pembuatan konsen. Berkembangnya ketiga industri ini disebabkan karena adanya potensi pasar di daerah, terutama untuk industri batu bata. Di mana pada saat ini baik pemerintah daerah maupun masyarakat memperlihatkan pertumbuhan pembangunan yang pesat, tentu saja bahan bangunan baik batu bata, konsen menyebabkan tingginya permintaan. Dari sisi lain industri ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang cukup banyak dan murah, sehingga biaya produksi dapat ditekan.

Tabel 1 Jenis dan Banyaknya Industri di Kabupaten Indragiri Hulu

Uraian		Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri rumah tangga kecil dan menengah	205	563
2	Industri kimia dan bahan bangunan	614	2.096
3	Industri sandang dan kulit	173	363
4	Industri kecil logam	94	329
5	Industri kerajinan umum	200	369

Sumber: Indragiri Hulu Dalam Angka, 2002

Industri sandang yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu adalah jenis usaha penjahit pakaian dan bordir dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 340 orang, salah satunya jenis usaha pertenunan sebanyak 1 unit usaha dengan 14 tenaga kerja. Belum berkembangnya usaha tenun disebabkan karena masih sempitnya pasar produk tenun itu sendiri. Dari sisi lain masalah mutu masih belum mampu bersaing dengan kenis tenunan yang lain. Begitu juga untuk mendapatkan bahan baku pengusaha masih menghadapi kesulitan.

Jenis industri kecil logam yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah industri pandai besi yang diusahakan oleh masyarakat dengan teknologi sederhana. Industri pandai besi ini menghasilkan jenis produk keperluan pertanian dan rumah tangga. Potensi pasarnya sangat bagus karena di

Kabupaten Indragiri Hulu lagi berkembang perkebunan kelapa sawit dan karet. Kebutuhan sarana pertanian untuk perkebunan kelapa sawit khususnya alat sederhana seperti parang, cangkul, sabit, gerobak, dodos sudah dapat dihasilkan oleh industri lokal dengan harga yang bersaing.

Di Kabupaten Indragiri Hulu telah berkembang juga bermacam kerajinan dan anyaman (kerajinan umum). Salah satunya kerajinan rotan sebanyak 14 buah dengan mempekerjakan 33 orang tenaga kerja, sedangkan anyaman pandan yang didominasi oleh ibu-ibu terdapat sebanyak 88 buah. Potensi kerajinan ini sangat bagus untuk dikembangkan karena memakai bahan baku lokal dan kegiatan ini akan dapat menciptakan multiplier effect terhadap kegiatan sektor lain.

3. Masalah yang Dihadapi

Untuk pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di daerah, kendala yang banyak dihadapi menyangkut dengan keterbatasan modal, khususnya untuk modal kerja, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, keterbatasan sumberdaya manusia (pekerja dan manajer) pengetahuan yang minim mengenai bisnis, keterbatasan informasi pasar, serta kurangnya penguasaan teknologi. Pada Tabel 2 disajikan matrik kesulitan yang dihadapi oleh UKM di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 2. Matrik Kesulitan Berbagai Jenis Industri di Kabupaten Indragiri Hulu

Jenis Kesulitan	Jenis Industri				
	Rumah Tangga	Kimia & Bangunan	Sandang & Kulit	Kecil Logam	Kerajinan Umum
Tidak ada kesulitan					
Modal	⊙	⊙	○	⊙	⊙
Pengadaan bahan baku	⊙	○	○	⊙	
Kurang keahlian dalam teknik produksi	○	⊙	⊙	○	⊙
Pemasaran	○	○	○	⊙	⊙
Kurang keahlian dalam pengolahan	○	⊙	⊙	○	○
Persaingan	○	○	○	○	○

Keterangan: ⊙ sangat sulit; ○ tidak sulit

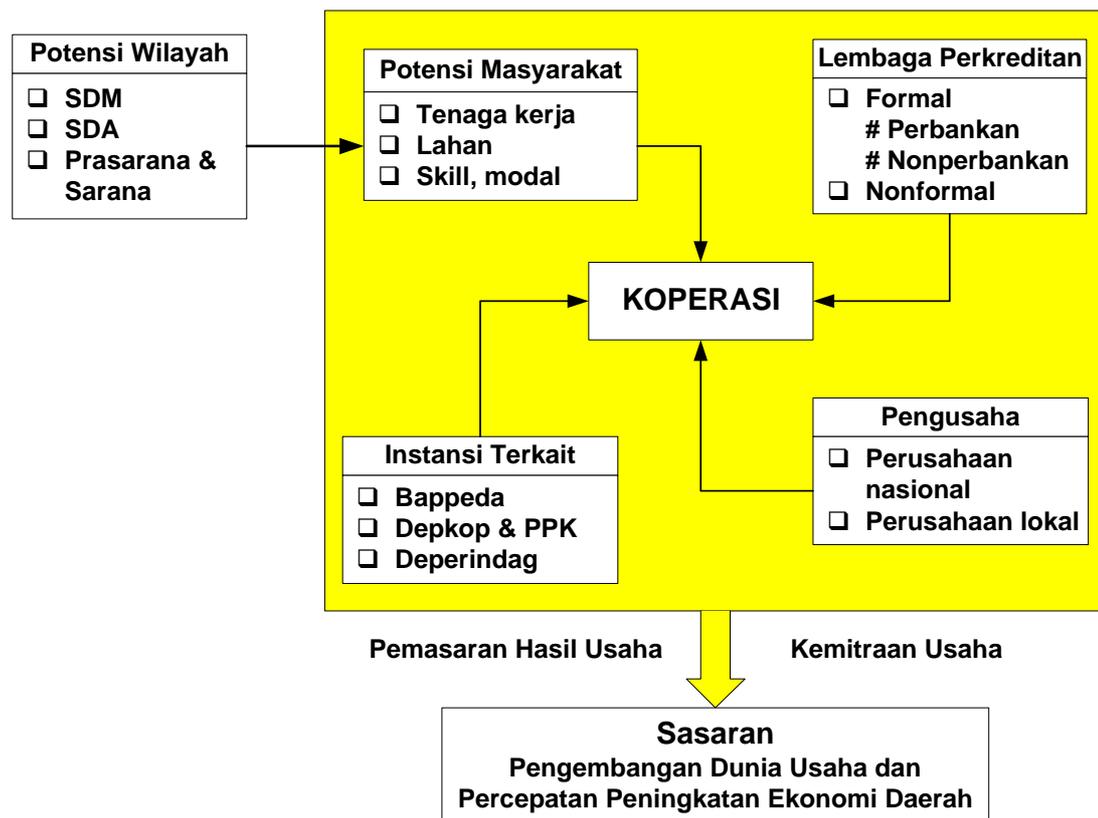
Dalam hal pemasaran, kesulitan yang dihadapi pengusaha-pengusaha kecil terutama disebabkan oleh keterbatasan akan berbagai hal penting, misalnya informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada, dana pemasaran/promosi, pengetahuan mengenai bisnis dan strategi pemasaran (terutama tingkat lokal dan regional). Dalam hal komunikasi juga menghadapi masalah, terutama kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain, begitu juga akses mereka ke fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi sangat terbatas.

4. Alternatif Strategi Pengembangan

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, khususnya

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan UKM yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan UKM, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung UKM tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Strategi Pengembangan UKM di Daerah

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan UKM di daerah. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk UKM yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, dalam negeri/lokal, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan UKM cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UKM ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di daerah/pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha apakah dalam bentuk agribisnis dan agroindustri atau usaha lainnya. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (UKM) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku mitra kerja UKM). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan UKM diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku bisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan pengusaha kecil. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

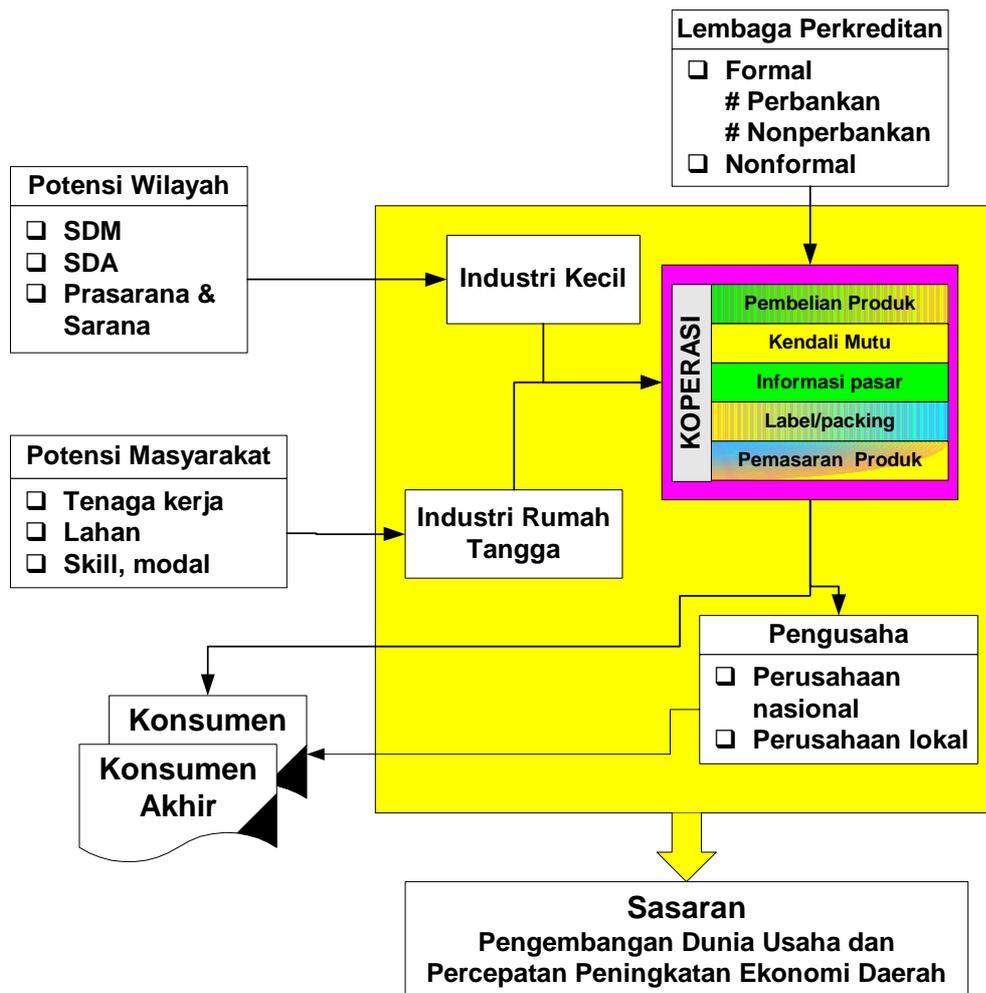
Koperasi sebagai badan usaha

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin kepada anggota (industri kecil). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh industri kecil sebagai anggotanya.

5. Paradigma baru pemasaran produk UKM

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Untuk mengembangkan UKM perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin usaha kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh pengusaha di daerah dapat teratasi (*Almasdi Syahza, 2003a*). Paradigma baru pemasaran produk UKM dapat dilihat pada gambar peraga yang disajikan (Gambar 3).



Gambar 3. Model Pemasaran Produk UKM di Daerah

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh anggotanya (industri kecil dan industri rumah tangga). Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk UKM. Dalam koperasi dilakukan pengendalian mutu (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk UKM, sehingga pengusaha kecil tidak ragu untuk melakukan kegiatannya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk (apakah itu agroindustri) di pedesaan, mesin dan alat pengolah harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep ekonomi kerakyatan di pedesaan dapat berkembang.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan punya peluang

pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha di pedesaan dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: *Pertama*, mencari alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu pengusaha kecil pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan.

Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha kecil, yaitu: *Pertama*, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga pengusaha di pedesaan mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; *Kedua*, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; *Ketiga*, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan *keempat*, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk industri kecil dan industri rumah tangga.

Kesimpulan

1. Lambatnya perkembangan UKM di daerah disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi pengusaha daerah. Permasalahan tersebut antara lain: a) Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; b) Ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya; c) Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi; d) lemahnya organisasi dan manajemen usaha; dan e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
2. Faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan UKM, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Kelima faktor ini harus dapat diberdayakan melalui kebijakan pemerintah daerah yang memihak kepada pengembangan UKM itu sendiri.
3. Pengembangan UKM di daerah diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran, yaitu: 1) menarik pembangunan di daerah; 2) menciptakan nilai tambah; 3) menciptakan lapangan pekerjaan; 4) meningkatkan penerimaan daerah; 5) memperbaiki pembagian pendapatan; dan (6) meningkatkan pengetahuan pengusaha melalui perubahan teknologi.

Rekomendasi

1. Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.
2. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM. Fungsi, antara lain: *Pertama*, mencari alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza., 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- ., 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 2003b. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/01/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2003c. Perkembangan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 2, Juli 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Bambang Yudoyono., 2001. *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mubyarto., 1993. *Riau Menatap Masa Depan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Setiadi Wijaya, N.H., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, NO. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

